

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perebutan kekuasaan kepemimpinan di Indonesia selalu diwarnai dengan beragam fenomena. Hal tersebut sering kali tercermin pada pemilihan pemimpin baik dari tingkat pusat, daerah, sampai ranah desa. Keinginan berkuasa serta menduduki jabatan menjadi alasan utama para kandidat melakukan segala cara agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan bahkan dengan usaha yang tidak wajar. Para kandidat atau calon yang maju dalam pemilu terkadang berlaku curang dan menggelar praktik yang tidak rasional. Hal tersebut selaras dengan pendapat Zulfiqar (2017:1) bahwa dalam kontestasi politik harus bermodalkan 3D, yakni dekat, duit, dan dukun. Dekat memiliki arti kandidat yang mencalonkan diri harus mempunyai relasi atau kedekatan dengan orang-orang yang sudah berada di dalam lingkup pemerintahan. Duit dijadikan sebagai modal penjangkaran suara dan menarik aspirasi dari masyarakat, sehingga untuk maju berkompetisi harus berani mengeluarkan modal yang besar (Tanjung & Ramadani, 2023:191), sedangkan dukun atau disebut juga paranormal membantu dari sisi spiritual. 3D yang terakhir ini sulit untuk dipahami menggunakan logika berpikir, karena dukun berada pada posisi yang cara kerjanya nyaris mustahil dibuktikan menggunakan sains di tengah kondisi politik yang sekarang semakin dinamis. Apalagi perkembangan zaman telah maju hingga membuat segala sesuatu melibatkan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Firmanzah (2007) melakukan kajian dalam bukunya yang berjudul “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas” tentang penawaran kepada

para politisi mengenai bagaimana cara-cara yang dapat ditempuh sebagai bentuk strategi dalam memenangkan kontestasi, akan tetapi pada kenyataannya meskipun telah ada para pakar profesional, namun dunia perpolitikan tidak bisa terhindarkan dari peranan dukun untuk meraih tampuk kekuasaan.

Eksistensi dukun dalam politik tidak terlepas dari pengetahuan tentang praktik perdukunan yang telah dimapankan. Pemahaman akan dukun sebagai orang yang sakti sudah tertanam kuat dalam pola pikir masyarakat, sehingga derasny arus modernisasi pun tidak mengubah cara pandang mereka terhadap dukun akan kemampuan supranaturalnya (Barokah, 2023:2). Jika ditinjau dari sisi ilmu psikologi terdapat istilah “psikologi transpersonal”. Dalam psikologi ini mistisisme menjadi tema sentral dengan mengkaji hubungan manusia dengan yang transenden. Meskipun tidak hanya pada ranah spiritualitas agama saja, namun psikologi transpersonal ini menurut Abraham Harold Maslow dalam Kahija (2009: 169) dapat digunakan untuk melihat pengalaman mistis dalam tiga wajah yang berbeda, yakni teistis, supranatural, dan nonteistis. Pengalaman mistis sendiri merupakan pengalaman yang subjektif dan tidak dapat dilihat maupun diamati, sehingga pengalaman mistis sangat berpotensi akan dianggap sebagai suatu hal yang tidak ilmiah.

Van Den Handwoordenboek Nederlands berpendapat bahwa mistisisme merupakan “penyimpangan dari pakem otentik” karena itulah mistisisme tidak dapat dinilai dan dilihat baik secara proses maupun praktik yang dilakukan dengan menggunakan rasionalitas akal manusia. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dimuat dalam *Webster’s New Twentieth Century Dictionary* jika

mistisisme atau *mystify* merupakan hal yang kabur, misteri, dan menjadi sebuah teka teki (Kuntowijodo dalam Barokah, 2023:2). Sama halnya dengan praktik perdukunan yang tidak dapat dipikirkan bagaimana cara mereka (dukun) mengatasi masalah klien dengan menggunakan logika nalar manusia, sebab dalam mistisisme terdapat unsur *magic* dan peran ghaib yang membantu para dukun melancarkan aksinya.

Meski sangat diragukan keilmiahannya pengalaman mistis ini agar bisa diterima menurut Maslow dapat diupayakan melalui seberapa sering frekuensi atau kekerapan pengalaman mistis ini ditampilkan. Terdapat salah satu faktor pemicu adanya pengalaman mistis, yakni keputusan. Hal inilah yang membuat ekisistensi dukun sampai sekarang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebab kesaktian yang dimiliki oleh dukun ditopang beragam wacana yang membuatnya seolah dapat menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga dukun menjadi jalan alternatif terbaik untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak terkecuali pada ranah perpolitikan yakni membantu meraih kemenangan kontestasi pemilihan pemimpin.

Kompleksitas kontestasi politik serta pertarungan memperebutkan kekuasaan pasti membuat kandidat mempertaruhkan segala cara mulai dari upaya-upaya profesional hingga ranah spiritual. Apalagi kepercayaan terhadap dukun sejatinya sudah ada sejak lama sehingga orang cenderung menyesuaikan dirinya dengan perilaku tersebut. Ditambah jika lingkungan sekitar mendorong untuk mempercayai dukun, maka secara tidak langsung juga membuat seolah perlu melakukan hal yang sama. Kondisi ini disebut oleh para ahli psikologi sebagai

konformitas yakni pengaruh sosial sebagai proses menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada (Riggio dalam Hanurawan, 2014:1). Untuk itu dirasa sangat perlu menjalankan konsistensi atas aturan dan perilaku yang sudah berlaku.

Pengetahuan modern (seperti pesatnya perkembangan sains) dengan pengetahuan klasik (seperti perdukunan) memiliki gaya pendekatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan untuk menjustifikasi klaim kebenaran masing-masing pengetahuan. Pengetahuan modern lebih menekankan bahwa kebenaran adalah suatu realita yang dihasilkan dari prosedur-prosedur baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengetahuan klasik seperti halnya perdukunan tidak memiliki suatu prosedur atau kerangka khusus untuk menguji kebenaran versi mereka. Pada konteks strategi untuk memenangkan kandidat saat kontestasi politik, terdapat perbedaan-perbedaan mengenai cara yang dilakukan dari segi ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan klasik. Berikut sajian dari Trihartono (2012: 4) yang mengkomparasikan antara konsultan politik berbasis *polling* yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern dengan dukun yang cenderung lebih menggunakan pendekatan supranatural.

Table 1. Perbandingan Peran Pakar Profesional dan Dukun dalam Kontestasi Politik

Pakar Profesional	Dukun
Mengukur popularitas	Mengambil “pulung”
Meningkatkan elektabilitas	Meningkatkan kharisma dan pamor
Memetakan karakteristik perilaku pemilih	Memetakan konstelasi dan mengidentifikasi musuh dalam selimut
Mengumumkan hasil polling untuk mempengaruhi persepsi pemilih	Membisikkan <i>wangsit</i> secara senyap agar kuat dan barokah
Menggunakan metode penarikan sampling dan wawancara dalam memperoleh data	Menggunakan roh-roh dan tirakat
Memberikan saran strategis dalam kampanye serta konsolidasi kemenangan	Memberikan ritual-ritual khusus agar lebih bersinar

Sumber : Trihartono (2012)

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam kontestasi politik kandidat pada akhirnya tetap mengikuti saran dari lembaga survei, namun juga menghayati petuah-petuah yang disampaikan oleh dukun. Keduanya merupakan upaya yang ditempuh agar bisa mendapatkan kekuasaan. Apalagi jika ditelaah lebih dalam praktik *magic* telah dilakukan pada zaman pra sejarah (O’Keefe dalam Humaeni, 2014:15). Kepercayaan terhadap mistisisme telah ada dan tercatat dalam literatur Jawa klasik yang menyebutkan bahwasannya orang pintar dalam hal ini yaitu dukun, resi, cenayang dianggap sebagai guru spiritual yang mengetahui dan bisa membaca masa depan atau dalam istilah Jawa disebut “*jangkaning zaman kang waskit sakdurunge winarah*” (Baharudin 2015: 368).

Meskipun modernisasi sudah mendominasi, dan agama samawi menjadi kepercayaan resmi yang telah disahkan oleh konstitusi, mistisisme perdukunan tetap melekat dalam kelangsungan hidup masyarakat, karena sudah menjadi perilaku yang dinormalisasi. Kepercayaan terhadap magis dan ghaib banyak ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia khususnya Jawa. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat dan budaya, Jawa menjadi tempat yang mayoritas masyarakatnya masih percaya dengan mistik dan nilai-nilai leluhur termasuk di dalamnya yaitu praktik perdukunan (Karerina, dkk, 2021: 112).

Dukun memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan eksistensinya pada kelangsungan hidup dimasa modern seperti sekarang. Dalam penelitian Ali Nurdin (2012: 391) tentang komunikasi magis dukun, untuk menarik para klien atau meraih kepercayaan orang agar menggunakan jasanya tersebut terdapat upaya persuasi yang dilakukan oleh dukun. Persuasi merupakan usaha untuk mempengaruhi pendapat, sikap, maupun tingkah laku seseorang atau banyak orang sekaligus (Roekomy, 1992: 2). Keberhasilan dalam persuasi ini akan menyebarkan pengetahuan tentang dukun sebagai sosok yang sakti, memiliki kekuatan supranatural, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan (Zulfiqar, 2017:1) sehingga membuat banyak orang termasuk para politisi berdatangan untuk menggunakan keahliannya.

Kekuatan yang dimiliki dukun sebagai modal membantu klien biasanya disebut dengan istilah yang lebih halus seperti uluran tangan leluhur bahkan ada juga yang menyebutnya pesan dari Tuhan untuk meningkatkan rasa percaya terhadap dirinya. Jasa yang ditawarkan pun cenderung terjangkau dibandingkan

dengan para ahli profesional. Terlebih pada kontestasi politik untuk menggandeng lembaga-lembaga resmi yang berkiprah dalam mengkalkulasikan peluang kemenangan seperti lembaga survei membutuhkan modal yang besar. Maka dari itu kandidat lebih tertarik untuk menggunakan jasa dukun karena pengetahuan akan keampuannya dan modal yang dikeluarkan juga terjangkau hanya berupa mahar yang diberikan seikhlasnya oleh kandidat. Alasan lain para calon kandidat menggunakan jasa dukun juga disampaikan oleh Humaeni (2014: 18) dalam penelitiannya, bahwa sesungguhnya terdapat beberapa faktor yang mendasari yakni sebagai bentuk dan wujud ikhtiar secara batiniah calon kandidat dalam mempersiapkan proses pencalonan, kurangnya rasa percaya diri dan kompetensi yang dimiliki, dukun menjadi sebuah bentuk *counter* magis antar para kandidat, pengaruh eksternal seperti keluarga, teman, maupun tim sukses, keyakinan pada kemampuan dukun yang bisa menarik welas asih dan suara masyarakat, serta percaya bahwa magis bisa memunculkan aura karismatik sehingga membuat masyarakat terkesima.

Keberadaan dukun diarah politik bukanlah suatu hal yang baru. Dukun dalam politik Indonesia sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang telah ada sejak lama bahkan dari awal berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia setelah masa kemerdekaan (Trihartono, 2012:2). Praktik perdukunan pada ajang kontestasi politik pun memang tidak menjadi rahasia umum lagi, justru dukun malah dianggap sebagai profesi yang menjanjikan untuk mencari keuntungan dimasa jelang pemilu (Zulfiqar, 2017:8). Geertz menyatakan dalam bukunya “Agama Jawa” bahwa politik dalam suatu negara merepresentasikan proyeksi

kebudayaan yang dimilikinya. Jawa sebagai daerah yang masih memegang erat budaya mempunyai keunikan dan pengaruh kebudayaan dalam proses demokrasi, dengan begitu tidak heran lagi jika banyak para kandidat yang mencalonkan diri melibatkan dukun pada saat proses kontestasi politiknya (Ilyas, 2018: 317-318).

Menggunakan jasa dukun pada kontestasi politik membutuhkan keberanian yang kuat sebab dalam proses perdukunan terdapat perjanjian-perjanjian yang mesti disetujui antara dukun dengan calon kandidat. Pada prosesnya banyak tahapan yang harus dilakukan oleh kandidat sesuai arahan yang diberikan dukun untuk mencapai tujuan kemenangan, mulai dari mempersiapkan jenis media *magic*, pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kandidat, serta sumber *magic* yang menjadi kekuatan (Humaeni, 2014: 19). Ada juga ritual-ritual khusus sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat seperti ziarah atau menyambangi makam dari orang yang dituakan biasanya disebut leluhur atau sesepuh, lalu menggunakan jimat atau alat yang sudah diberi kekuatan *magic*, dan mengunjungi tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan (Bahaudin, 2015: 383).

Dukun dan calon kandidat memiliki hubungan yang bersifat resiprokal dan saling mempengaruhi sehingga kerja sama yang dijalin antar keduanya berdampak besar atas hasil dari kontestasi politik (Barokah, 2023: 11). Selain memberi perlindungan maupun melakukan penyerangan menggunakan kemampuan magisnya, dukun pun menjadi seorang “konsultan politik” dengan menyampaikan pesan, nasehat-nasehat dan ramalan kepada calon kandidat melalui penerawangan dari kemampuan supranatural yang dimiliki dengan menggunakan primbon, perhitungan jawa, aksara nama dan cara-cara lain yang ditempuh untuk melihat

peluang kemenangan (Zulfiqar, 2017: 5). Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Kyai Cholik pada penelitian Ilyas (2018) yang menyebutkan bahwa dukun memiliki tugas untuk mengakomodir calon kandidat dengan memberikan nasehat-nasehat spiritual dan menjadi *protect* bagi calon dari serangan-serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan saat proses menjelang pemilihan umum.

Masuknya dukun dalam pemilihan umum menjadi ajang pertemuan antara naluri mistis dengan rasionalitas (Zulfiqar, 2017: 4). Meskipun sistem politik sudah mengalami perubahan yang lebih maju, namun pengaruh mistis dalam politik masih ada dan akan terus terjadi. Apalagi praktik-praktik perdukunan diajang kontestasi politik tersebut sudah menjadi pengetahuan dan bagian dari kebudayaan serta tradisi yang akan tetap terjaga meskipun ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat (Efriansy, 2018: 35). Pengetahuan yang telah tertanam kuat yang dianggap sebagai kebenaran membentuk sebuah pola pikir yang selalu berujung pada kemenangan dapat diraih melalui perdukunan. Dari hal inilah menimbulkan efek kuasa hingga pada akhirnya menciptakan sebuah kontrol sosial.

Salah satu wilayah yang sampai sekarang masih melibatkan pengaruh dukun dalam kehidupan sehari-hari adalah Desa Tirtamukti, Kecamatan Tayu. Daerah yang masuk dalam Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ini masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap dukun dan tradisi leluhur. Dikutip dari website resmi Pemerintah Kabupaten Pati, mayoritas masyarakat di sana masih bersinggungan dengan mistisisme, bahkan banyak sebagian besar dari mereka juga menekuni ilmu kejawan hingga berprofesi menjadi dukun. Kabupaten Pati juga dijuluki sebagai Hogwartsnya pulau Jawa atau sebagai kotanya para dukun dan

sihir. Banyak tempat di Kabupaten Pati yang sampai saat ini masih melibatkan mistisisme pada kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam lingkup sosial saja, namun penggunaan ilmu sihir tersebut meluas hingga ranah perpolitikan, terutama ketika proses kontestasi politik yang ada pada tingkat desa. Desa sebagai tempat yang masih kuat dengan kepercayaan mistisisme dan kebudayaan leluhur membuat eksistensi perdukunan masih digunakan hingga sekarang. Pertarungan untuk duduk di kursi jabatan dengan bantuan dukun menjadi hal yang lazim di berbagai daerah khususnya wilayah Kabupaten Pati.

Studi ini mencoba merekam secara empiris kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan dan bagaimana eksistensialisme dukun ketika bertugas dan bekerja dalam kontestasi politik khususnya lingkup pemilihan kepala desa. Selain itu hal utama yang akan digali oleh peneliti adalah mencari artefak-artefak tentang pengetahuan apa saja yang menopang dukun sampai langgeng digunakan ketika kontestasi politik. Tidak banyak peneliti khususnya penelitian sosial yang memiliki ketertarikan serta memberikan perhatian terhadap fenomena dukun politik tersebut. Padahal fenomena penggunaan jasa dukun sebagai salah satu komponen untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang memiliki keunikan tersendiri, apalagi praktik tersebut seolah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, hingga memberi efek pada kuasa akan kontrol sosial. Oleh karenanya penelitian ini berupaya untuk mengungkap realitas perdukunan dalam ajang kontestasi politik lokal di tengah pesatnya arus modernisasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi dalam latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengarahkan perhatian pada sebuah isu yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pengetahuan yang menopang eksistensi dukun sehingga masih langgeng digunakan dalam kontestasi politik?
2. Bagaimana relasi kuasa antara dukun dengan kandidat dalam pemilihan kepala desa di Desa Tirtamukti?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Teoritis

Pada aspek kontribusi keilmuan, penelitian ini berusaha menganalisis sekaligus juga melacak terkait peran dukun dan pengaruh mistisisme pada saat kontestasi politik. Dalam konteks ini, dukun menjadi aktor yang “bermain” untuk membantu kandidat meraih kemenangan pada ajang pemilihan kepala desa. Aspek lain juga ditampilkan sebagai dasar pelacakan kemunculan strategi kemenangan non rasional hingga tetap eksis sampai sekarang. Dengan mengetahui aspek tersebut maka akan membuka pengetahuan yang menopang eksistensi dukun pada ranah politik serta membuka lebih banyak pintu bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk masuk ke dalam dimensi ini sebagai hal yang jarang disentuh oleh para ilmuwan sosial. Padahal sejatinya ranah politik tidak terhindar dari peran mistisisme di dalamnya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini menghadirkan informasi baik kepada pembaca dan peneliti sendiri, maupun masyarakat secara umum bahwa eksistensi perdukunan sejatinya masih ada, dipertahankan, bahkan digunakan dalam konteks politik sebagai salah satu alternatif untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat secara luas bahwa sejatinya politik tidak hanya berbicara pada kemungkinan rasionalitasnya saja, namun juga terdapat dimensi lain sebagai “varian” yang mewarnai dunia perpolitikan yakni erat budaya lokal dan kepercayaan mistisisme sebagai salah satu strategi dalam memenangkan kontestasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu politik dan pemerintahan dalam mengembangkan keilmuan khususnya mengenai konsep kekuasaan yang sifatnya *softpower* serta praktik demokrasi dengan melibatkan unsur irasional (mistik) pada kontestasi politik pemilihan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dengan fenomena serupa di wilayah lain sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih luas serta menjadi dasar rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap bisa mendapatkan pengalaman baru serta ilmu yang bermanfaat. Selain itu juga memperoleh khazanah pengetahuan dan wawasan dari proses penelitian yang telah ditempuh yang sebelumnya belum pernah didapatkan.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi serta menghadirkan wawasan baru kepada masyarakat tentang dinamika yang terjadi pada saat proses kontestasi politik, khususnya intrik tak kasat mata sebagai upaya memenangkan kontestasi politik desa. Selain itu peneliti juga berharap dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa dalam proses demokrasi tidak terhindarkan dari peran budaya dan tradisi.

1.4.4 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyikapi dan merespon proses keberjalanan kontestasi politik yang masih erat kaitannya dengan unsur supranatural. Realitas yang terjadi pada pemilihan kepala desa hingga melibatkan unsur mistik ini tentu menimbulkan persoalan sehingga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah agar sekiranya dapat meminimalisir gejolak politik pada proses demokrasi yang sedang berlangsung.

1.5 Literatur Review

Eksistensi dukun dalam kehidupan masyarakat tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan masih ada sampai sakarang. Dukun tidak hanya dilibatkan dalam urusan sosial saja, namun perannya kini semakin luas hingga menjamah pada ranah politik. Studi mengenai dukun dalam politik memang bukan suatu hal yang baru. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis sudah terdapat cukup banyak penelitian yang mengkaji tentang keterlibatan dukun dalam politik. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Barokah, F (2023) bahwa politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari aspek mistisisme. Hal ini bisa dilihat pada kekuasaan dari masa ke masa yang pasti melibatkan mistisisme di dalamnya. Dari masa orde lama sampai reformasi hingga masa kini mistis dijadikan sebagai sumber kekuatan spiritual yang diharapkan mampu memberikan kemudahan serta kelancaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Sama halnya dengan penelitian Zulfiqar, E (2017) juga mengungkapkan jika mistisisme sudah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pada praktiknya mistisisme seperti praktik perdukunan justru banyak dilakukan saat kontestasi politik bahkan nyaris mengatur segala hiruk pikuk perpolitikan. Meskipun terdapat lembaga survei dan konsultan politik yang bertugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan menganalisis kondisi politik dengan berbasis pada data, namun keterlibatan dukun di ranah politik ini tidak dapat dihilangkan karena sudah menjadi suatu kepercayaan yang melekat dalam kehidupan dan politik nasional.

Dukun menjadi aktor yang banyak dikenal oleh masyarakat baik dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Eksistensi dukun di

Indonesia diakui oleh banyak orang karena mereka sebagai pengguna yang sudah pernah memanfaatkan jasa dukun merasakan pengaruh dari kekuatan supranaturalnya. Menurut Hatimah, dkk (2023) ada beragam jenis dukun di Indonesia, mulai dari *sanro pappamole* atau *sanro tomalasa* yang memiliki keahlian dalam mengobati serta menyembuhkan penyakit, lalu dukun *sanro puru* sebagai dukun tradisional, serta dukun yang ahli meramalkan masa depan. Begitu juga dengan Anggorodi (2009) menjelaskan bahwa dukun di Indonesia memiliki banyak tugas dan fungsi. Salah satunya yaitu dukun *petungan* yang memberi nasihat baik serta dukun *perewangan*. Dukun petungan dan dukun perewangan dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan dukun-dukun yang lain. Mereka akan menggunakan perhitungan hari baik (weton) serta berhubungan dengan alam *ghaib* untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kitab primbon Jawa pun digunakan sebagai media dan petunjuk untuk meramalkan masa depan dan nasib seseorang. Dwiayatina, H (2020) menyebutkan dalam karyanya bahwa Dukun tampil sebagai aktor penolong dan pembantu masyarakat. Akan tetapi disatu sisi dukun juga dianggap sebagai sosok yang kejam dan jahat.

Praktik perdukunan dilakukan oleh banyak kalangan termasuk tokoh politik yang hendak menjabat maupun yang sudah duduk dalam kursi kekuasaan. Hidayat, E (2019) mengungkap jika seseorang yang mencalonkan diri sebagai kandidat untuk maju dalam pemilihan pemimpin akan bergantung pada kekuatan supranatural yang dimiliki oleh dukun. Kontestasi politik yang kompleks membuat kandidat melakukan berbagai upaya agar dapat memenangkan pemilihan. Hal yang mendasari praktik-praktik magis ini adalah persepsi "*laku tinimbang nuku*"

yang artinya usaha dengan kekuatan spiritual dianggap lebih ampuh dari pada membeli suara masyarakat.

Dari berbagai literatur yang telah dijelaskan di atas studi tentang dukun dalam politik di Indonesia hanya berfokus pada peran dukun secara struktural saja. Hal ini bisa terlihat dari tidak banyaknya peneliti yang memberikan perhatian terhadap hubungan politik yang dilakukan antara dukun dengan calon kandidat pada saat pemilihan pemimpin. Padahal kenyataan di lapangan terdapat hubungan yang erat, intim, dan kuat antara kedua belah pihak tersebut dalam memenangkan kontestasi politik. Apalagi untuk pemilihan pemimpin level desa yang masih kental dengan pengaruh budaya dan kepercayaan terhadap leluhur membuat praktik perdukunan gencar untuk dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengungkap kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan, relasi kuasa dan langgengnya eksistensi yang dimiliki oleh dukun dalam upaya mendukung kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Tirtamukti menurut perspektif Foucauldian.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Dukun dalam Politik

Salah satu aspek kultural yang tidak tergerus perubahan zaman adalah budaya lokal khususnya Jawa yang disebut sebagai Javanisme. Javanisme atau *Kejawen* menurut Niels Mulder (1996) merupakan suatu nilai-nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Jawa. Javanisme bukan sebuah religius, namun lebih menekankan pada etika dan gaya hidup yang dipilih atas dasar kebudayaan Jawa. Paham ini muncul dari perkembangan

animisme dan dinamisme yang memberikan pengaruh terhadap akar budaya Jawa hingga tetap eksis dan berkembang maju sampai sekarang (Simuh, 2003: 40). Ditambah lagi kepercayaan ini juga mengembangkan adanya berbagai paham dan ilmu termasuk perdukunan yang dianggap memiliki kekuatan magis. Meskipun era sekarang merupakan masa transisi ke arah modernisasi namun ilmu perdukunan, sihir, dan jampi-jampi nyatanya tetap ada dan justru semakin marak digunakan (Huda, 2015).

Dukun merupakan bagian dari mistisisme yang masih melekat dengan kepercayaan masyarakat. Saat ini dukun menjadi sebuah profesi yang tetap bertahan di beberapa wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan jasa magisnya. Secara sosial dukun memiliki rasa hormat di kalangan masyarakat (Sherliawati, 2014:9), sebab dukun dipandang sebagai manusia spesial karena mempunyai kemampuan supranatural yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Meskipun dukun identik dengan pedesaan namun tidak menutup kemungkinan di perkotaan juga masih percaya perdukunan. Ruslani dalam Angel (2009) mengatakan bahwa dukun di perkotaan ternyata lebih pesat dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dapat diartikan profesi dukun tidak mengalami kemerosotan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang. Bukan tanpa alasan namun praktik perdukunan tetap langgeng sejatinya disebabkan oleh banyak faktor. Seperti yang dijelaskan Abidin (2010) setidaknya terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab dukun tetap eksis. Pertama, aspek budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dukun menjadi bagian dari kebudayaan, bahkan eksistensi dukun

sudah ada sejak sebelum masuknya agama di Nusantara. Kedua, lemahnya ilmu agama dan jauhnya dari para ulama berakibat pada lemahnya akidah. Ketiga, kurangnya kesabaran seseorang dalam menerima kenyataan. Biasanya hal tersebut dapat dijumpai dikalangan pebisnis dan elit politik dengan penggunaan jasa dukun untuk kelancaran usaha, politik, maupun dalam mencapai apa yang diinginkan. Dukun juga dijadikan sebagai jalan pintas untuk mencapai kesuksesan dengan mudah, instan, ringan. Lalu yang terakhir, pemerintah dalam hal ini membiarkan bahkan cenderung mendukung praktik perdukunan.

Pada umumnya jasa dukun tidak diiklankan di media massa atau sosial media, namun dari mulut ke mulut masyarakat. Oleh karena itu dukun sangat mengandalkan kesaktiannya dalam memasarkan keampuhan dirinya, karena jika sudah benar-benar terbukti ampuh dan sakti maka jasanya akan banyak digunakan oleh masyarakat. Istilah dukun juga sering didudukkan dengan konotasi yang negatif. Oleh karena itu untuk mengubah pandangan tersebut dalam masyarakat khususnya Jawa istilah ini diganti dengan konotasi orang pintar, orang yang dititipi ilmu, atau orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan. Sementara itu kekuatan atau ilmu yang dimiliki oleh dukun juga dipercaya bercabang menjadi dua aliran, yakni aliran hitam dan aliran putih (Trihartono, 2012). Aliran hitam dimaknai sebagai kekuatan yang digunakan dengan cara-cara yang bertentangan pada syariat agama. Bahkan ada juga yang menganggap dukun aliran hitam bersekutu dengan jin atau roh jahat untuk melakukan tujuan buruk. Sebagai contoh dukun santet yang

menggunakan kekuatannya untuk menyiksa atau membunuh seseorang. Berbeda dengan dukun aliran putih justru dipandang sebagai dukun yang menggunakan ajaran agama dalam menyelesaikan permasalahan.

Dukun bertransformasi menjadi konsultan politik versi tradisional membantu kandidat atau calon dalam memenangkan kontestasi pemilu. Politik kontemporer yang selalu identik dengan penggunaan data empiris sebagai tolak ukur tidak serta merta menjadikan eksistensi perdukunan menjadi hilang dalam kehidupan yang modern seperti sekarang. Ditambah adanya konteks budaya dalam masyarakat Indonesia terutama dalam wilayah pedesaan yang masih banyak mempercayai adanya kekuatan magis menjadikan dukun dipercayai sebagai seseorang yang memiliki kekuatan supranatural untuk bisa memenangkan kontestasi politik. Meskipun pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh dukun tidak diperoleh dari pendidikan formal, namun sederhananya para kandidat yang akan bersaing memperebutkan kekuasaan mengandalkan kekuatan magis dari dukun agar mampu untuk memenuhi keinginannya yakni meraih tampuk kekuasaan. Dalam konteks penelitian ini, melekatnya budaya tradisional yang mempercayai kekuatan supranatural dukun digunakan sebagai media untuk kemenangan pemilihan kepala desa di Desa Tirtamukti. Berdasarkan pernyataan dari Abidin yang telah dijelaskan di atas tentang alasan yang membuat masyarakat masih percaya kepada dukun memberikan gambaran yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dukun tetap eksis dalam kontestasi politik di era globalisasi sekarang ini yang semakin pesat

1.6.2 Pengetahuan dan Kekuasaan

Para filsuf pada umumnya memahami sebuah kekuasaan sangat erat kaitannya dengan dominasi dan berorientasi pada legitimasi yang bersifat vertikal. Kekuasaan tidak jauh dari perihal institusi atau negara sebagai subjek pemilik kekuasaan tertinggi dan mutlak. Pemaknaan akan kekuasaan yang demikian memungkinkan negara mewajibkan semua orang untuk patuh, sehingga kekuasaan semacam ini membagi dua subjek yakni penguasa dan yang dikuasai. Pandangan mengenai konsep kekuasaan tersebut sangat berbeda dengan perspektif Michel Foucault yang justru menampilkan pemaknaan baru terhadap konsep kekuasaan, bahkan merombak arti kuasa menjadi lebih luas yaitu kekuasaan adalah dimensi dalam setiap relasi (Afandi, 2012: 133).

Michel Foucault (1926-1984) merupakan seorang cendekiawan Prancis abad ke-20 dengan pemikiran yang luar biasa serta memberikan perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan salah satunya tentang konsep kekuasaan. Cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh Nietzsche yang mengidentifikasikan hasrat untuk benar adalah hasrat untuk berkuasa (Syafiuddin, 2018: 149). Menurut versi Foucault kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh negara dan dapat diukur, namun kekuasaan berada dimana-mana, berlangsung pada setiap relasi, serta tersebar dalam jaring-jaring sosial. Selain itu dirinya juga mendefinisikan bahwa kekuasaan melekat pada keinginan untuk tahu, sehingga Foucault menyebutkan istilah wacana yakni di dalamnya mengandung suatu kehendak untuk mengetahui yang terumus

dalam pengetahuan. Wacana ini bukan muncul begitu saja, tetapi diproduksi pada setiap episteme masa.

Dengan pemikiran yang demikian bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisas melalui pengetahuan, dan setiap pengetahuan selalu mempunyai efek kekuasaan. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwasannya pengetahuan selalu diproduksi oleh kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap benar, sedangkan kekuasaan memerlukan pengetahuan untuk memperkuat dan mempertahankan apa yang dianggap benar. Jadi hampir tidak mungkin suatu kekuasaan tidak ditopang oleh pengetahuan atas wacana kebenaran. Akan tetapi perlu dipahami juga bahwa kebenaran yang dimaksud oleh Foucault bukan serta merta ada begitu saja, namun kebenaran di sini diproduksi melalui bagaimana pemakaian atas pengetahuan itu digiring sehingga menjadi pakem yang telah ditetapkan.

Kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep kekuasaan yang digagas oleh Foucault secara esensial tidak represif dan memungkinkan suatu kuasa muncul dari bawah. Sebab kendati kuasa ada dalam setiap relasi, tetapi bentuk dari kuasa ini bukan dalam hal dominasi melainkan melalui normalisasi dan praktik pendisiplinan (Kebung, 2017: 42). Konsep Foucault ini membawa pengaruh terhadap sifat kekuasaan yang lebih produktif dan reproduktif, sehingga untuk memahami kekuasaan harus mengetahui bagaimana operasi kekuasaan itu sendiri dan dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Maka langkah awal yang penting

untuk ditempuh adalah menemukan artefak-artefak pengetahuan yang ada, sebab pengetahuan digunakan sebagai operasionalisasi kekuasaan (Mudhoffir, 2013: 78).

Untuk menemukan rezim pengetahuan yang mengoperasikan kekuasaan, Foucault menggunakan sebuah perangkat analisis yakni arkeologi pengetahuan, serta genealogi kekuasaan untuk mengetahui cara bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Genealogi akan melacak asal-usul munculnya sebuah realitas lewat *tracking* di masa lampau. Dengan demikian, konsekuensi dari pemahaman ini untuk mengetahui kekuasaan versi Michel Foucault, dibutuhkan penggalian yang mendalam tentang pengetahuan dan awal kemunculan sebuah realitas yang melandasi kekuasaan.

Pada kaitannya dengan penelitian ini pengetahuan akan kesaktian dukun yang mampu menjadi konsultan dengan memberikan solusi permasalahan serta membantu meraih kemenangan dalam kontestasi politik telah dimapankan hingga pengetahuan tersebut dianggap benar. Kebenaran akan pengetahuan ini juga ditopang oleh formasi wacana yang pada akhirnya menguatkan kebenaran atas pengetahuan kemenangan politik diraih melalui kekuatan dukun. Pengetahuan yang telah dimapankan menimbulkan efek kuasa, yang dapat dilihat dari eksistensi dukun masih langgeng dan dijadikan sebagai strategi dalam kontestasi. Bahkan jasa dukun juga marak digunakan oleh masyarakat khususnya para politisi, sebab mereka percaya dukun membawa sebuah kekuatan yang bisa memuluskan segala urusan, termasuk kemenangan.

1.6.3 Relasi Kuasa

Relasi kuasa atau *power relation* merupakan hubungan yang dibangun oleh individu maupun kelompok dengan individu atau kelompok lainnya berdasarkan pada tujuan dan ideologi tertentu (Yulianti, 2020: 8). Relasi kuasa bukan hanya sekedar membangun hubungan, namun juga adanya pengaruh baik secara timbal balik atau hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Terbentuknya relasi kuasa pasti memiliki kepentingan yang ingin dicapai dengan adanya unsur kekuatan relasi sosial di dalamnya.

Relasi kuasa tidak hanya dipahami sebagai hubungan kekuasaan *hard power*, namun juga *soft power*. Paham tersebut telah dikembangkan oleh banyak sosiolog post strukturalis seperti Michel Foucault. Kekuasaan sendiri menurut Foucault merupakan hasil dari sebuah konstruksi pengetahuan. Terinspirasi dari gagasan Nietzsche yang berbunyi “*the will to know is the will to truth, the will to truth is the will to power*”. Jika diartikan keinginan untuk mengetahui adalah keinginan untuk benar, dan keinginan untuk benar adalah keinginan untuk berkuasa. Sederhananya terdapat sirkulasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Keinginan atas hasrat untuk mencari tahu (berwacana) akan memproduksi sebuah pengetahuan yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuasaan. Kemudian, Foucault juga menyebut apa yang dimaksud dengan *epistime*, yakni bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai sebuah makna terhadap kondisi dan situasi tertentu pada suatu zaman. Sehingga pada suatu zaman atau masa tertentu memiliki makna kekuasaan yang berbeda-beda

tergantung bagaimana sesuatu itu ditafsirkan dan dimantapkan lewat formasi wacana (discourse).

Berbeda dengan aliran strukturalis yang menganggap sebuah budaya timbul dari ketidaksadaran kolektif lingkungan, namun post strukturalis menganggap jika adanya budaya itu merupakan hasil dari operasionalisasi kekuasaan. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Foucault bahwa kekuasaan merupakan konstruksi yang di belakangnya dimantapkan lewat sebuah pengetahuan. Dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap kiyai, dukun, atau orang pintar lainnya ditopang oleh wacana budaya di dalamnya. Konsep relasi kuasa menurut Foucault memiliki ciri khas yang berbeda dengan para ahli umumnya. Bukunya yang berjudul *“The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language”* Foucault memperkenalkan pendekatan baru yakni arkeologi pengetahuan yang berbeda dengan kajian struktural lainnya. Pendekatan arkeologi pengetahuan ini lebih menekankan pada praktik yang dilakukan dalam suatu masa tanpa memberikan penilaian baik atau buruk, benar atau salah pada objek penelitian tersebut.

Arkeologi pengetahuan digunakan untuk mengungkap mitos dari kebenaran ilmu sosial yang bersifat universal. Pendekatan ini memiliki karakteristik berbeda dengan pendekatan lain. Gustomy (2009) dalam bukunya yang berjudul *“Negara Menata Ummat”* menegaskan bahwa pendekatan arkeologi pengetahuan berjarak dalam beberapa hal yakni pertama, pendekatan arkeologi pengetahuan menghindari pemahaman yang dialektis atau lebih menekankan kepada interkoneksi atau keterhubungan antar sebab dan bahkan

juga keterputusannya. Pendekatan arkeologi berusaha untuk melihat fungsi yang bekerja pada suatu relasi kuasa yang telah dibangun. Kedua, dalam pendekatan arkeologi pengetahuan tidak ada peran atau tokoh utama dalam suatu peristiwa. Subjek yang ada ditempatkan sebagai pengisi wacana kekuasaan, dan bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas. Hal ini karena dalam relasi kuasa Foucault kekuasaan bersifat *soft power*, bukan *hard power*. Alasan penempatan posisi subjek yang demikian adalah karena yang dicari bukan kebenaran pada sebuah realitas, namun uraian atau jalan cerita peristiwanya itu sendiri. Ketiga, pendekatan ini tidak menekankan pencarian konsistensi atau melihat gagasan, kebenaran, dan ide dalam praktik kekuasaan. Selain itu tidak ada kategori final untuk mengukur pemahaman dari suatu realita yang terjadi. Keempat, Pendekatan arkeologi pengetahuan tidak mencari kebenaran dan detail dari sebuah realita. Pendekatan ini lebih pada pencarian bagaimana suatu realita tersebut terbentuk dan direproduksi berulang-ulang. Pada pendekatan ini tidak menawarkan benar atau salah, namun berbahaya atau tidaknya suatu praktik tertentu untuk sebuah kepentingan.

Foucault juga menawarkan sebuah pendekatan yang melengkapi arkeologi pengetahuan yang telah dipaparkan di atas. Pendekatan tersebut yaitu *genealogy of power* atau genealogi kekuasaan. Pendekatan ini berusaha untuk melakukan pembongkaran mengenai bagaimana beroperasinya suatu kekuasaan, dan melihat hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan (Mudhoffir, 2013: 9). Genealogi menekankan pada proses menggali suatu peristiwa sejarah serta melacak asal usul sejarah tentang munculnya suatu

pembenaran yang ada saat ini. Dengan adanya genealogi sebagai alat maka akan memperluas penyelidikan terhadap beroperasinya suatu kekuasaan.

Berbeda dengan relasi kuasa menurut Anderson (2000), khususnya kekuasaan Jawa yang memiliki karakteristik bertolak belakang dari konsep kekuasaan barat. Bagi budaya Jawa kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang ada tanpa melihat orang yang memiliki atau menggunakan kekuasaan tersebut. Dengan kata lain kekuasaan bukanlah hal yang teoritis tetapi realitas yang nyata adanya. Kekuasaan Jawa penuh dengan misteri, dan memiliki keterhubungan dengan alam semesta. Kekuasaan juga tidak dinilai dari keabsahannya karena menurut mereka kekuasaan bukan persoalan keabsahan, yang terpenting kekuasaan itu benar-benar ada. Pandangan masyarakat Jawa terhadap kekuasaan yang demikian dan tradisi birokrasi lokal mereka yang dibangun atas dasar legitimasi magis menciptakan suatu iklim kontestasi demokrasi di Jawa masih berelasi dengan mistis (dukun).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Dukun dalam Politik

Dukun dalam penelitian ini tidak hanya sebatas paranormal atau seseorang yang memiliki kemampuan supranatural, akan tetapi dukun didudukkan sebagai subjek yang terlibat dalam operasionalisasi kuasa. Pendefinisian dukun pada operasionalisasi ini mengacu pada pengelompokan Clifford Geertz (2013), yakni meliputi dukun priyayi yang bertugas dalam membantu menjalankan roda pemerintahan, dukun santri atau disebut sebagai kyai, dan dukun abangan yang menggunakan kekuatan mistis supranatural serta dipercaya oleh calon/kandidat

untuk ikut serta membantu dalam keberlangsungan kontestasi pemilihan kepala desa. Pelibatan dukun diranah politik tersebut akan dianalisis untuk mengetahui hal-hal apa saja yang membuat eksistensi dukun tetap langgeng dengan menggunakan definisi kerja atau operasionalisasi yang diadopsi dari Abidin (2010) yakni sebagai berikut:

1. Aspek Budaya yang mengakar kuat di masyarakat
2. Nilai dan norma keagamaan yang dilihat dari kuat atau tidaknya ajaran agama dalam masyarakat serta pandangan agama mengenai perdukunan khususnya di Desa Tirtamukti.
3. Kebijakan pemerintah terhadap praktik perdukunan di Desa Tirtamukti.

Selain itu pada operasionalisasi ini bukan hanya sebatas tentang eksistensi dukun yang tidak tergerus oleh perkembangan zaman, namun juga meliputi perannya yang tetap langgeng dalam membantu kandidat yang maju di kontestasi politik khususnya pada pemilihan kepala desa Tirtamukti.

1.7.2 Pengetahuan dan Kekuasaan

Pengetahuan dan kekuasaan dalam penelitian ini merupakan dua hal yang saling berkaitan serta menjadi tubuh pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti. Pengetahuan merujuk pada temuan-temuan arkeologi di lapangan tentang perdukunan yang dilakukan oleh para kandidat menjelang kontestasi pemilihan kepala desa Tirtamukti. Wacana apa saja yang menopang pengetahuan tersebut akan dicari tau untuk mengetahui bagaimana beroperasinya kuasa. Dengan

demikian relasi antara pengetahuan dukun dan kekuasaan sebagai efeknya akan berimplikasi terhadap tubuh kandidat dengan bentuk kontrol sosial.

Sesuai dengan konsepsi Foucault, pengetahuan adalah sebuah landasan sebagai hasrat untuk menjadi benar. Sedangkan kekuasaan adalah efek yang ditimbulkan setelah adanya kebenaran yang dihasilkan dari pengetahuan. Maka operasionalisasi pada penelitian ini adalah segala pengetahuan yang terbentuk dan terekonstruksi mengenai perdukunan yang diyakini oleh masyarakat dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Sementara kekuasaan merupakan efek yang saling berkelindan dengan adanya pengetahuan yang tertancap pada praktik perdukunan. Sederhananya, kekuasaan disini termanifestasikan oleh segala sesuatu yang menjadi efek adanya pengetahuan untuk melakukan perdukunan untuk melancarkan dalam meraih kemenangan kontestasi pemilihan kepala desa Tirtamukti.

1.7.3 Relasi Kuasa

Kekuasaan yang dimaksud pada penelitian ini bukan kekuasaan secara langsung, namun kekuasaan yang tersembunyi dan tersebar dalam jaring-jaring sosial. Relasi kuasa pada praktik perdukunan diajang kontestasi politik akan ditelusuri dengan berpedoman pada teori Michel Foucault (1982). Maka untuk mengetahui relasi kuasa tersebut mengedepankan pencarian artefak-artefak pengetahuan yang menopang melalui metode arkeologi pengetahuan. Adapun unsur-unsur sebagai penegasan dari pendekatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterhubungan atau interkoneksi
2. Subjek tidak menjadi tokoh utama, hanya pengisi diskursif wacana

3. Tidak mencari idealitas kebenaran dalam sebuah kekuasaan.
4. Adanya realitas yang terbentuk dan direproduksi berulang-ulang tanpa mencari benar atau salahnya namun bahaya atau tidak untuk sebuah kepentingan.

Selain itu untuk menguatkan pencarian pengetahuan ini, penting kiranya mengetahui asal usul adanya dukun dengan menggunakan genealogi. Pendekatan arkeologi pengetahuan dan genealogi digunakan sebagai mekanisme kerja untuk mencari relasi kuasa dari praktik perdukunan dalam pemilihan kepala desa Tirtamukti. Konsep kekuasaan yang dijalankan pada relasi sosial antara dukun dengan kandidat tersebut ditemukan dalam arsip cerita dan perbincangan yang ada di sekitar masyarakat, dan mencoba mengetahui pembiasaan yang dinormalisasikan sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku subjek khususnya pada peristiwa pemilihan kepala desa Tirtamukti.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang digagas oleh Michel Foucault yakni metode arkeologi pengetahuan (*arkeology of knowlence*) dan genealogi kekuasaan (*genealogy of power*). Pendekatan dalam metode ini memiliki sebuah pemahaman yang berbeda dengan lebih menekankan pada pencarian atau melacak sebuah praktik yang ada dan terbentuk dalam kehidupan tanpa bermaksud untuk memberikan penilaian atas kebenaran ataupun kesalahan dari praktik tersebut. Pemikiran Foucault

yang lebih mengarah pada produksi pengetahuan dan wacana menjadi asal terciptanya analisis arkeologi. Arkeologi melihat kondisi diskursif dari sebuah pengetahuan yang dianggap benar. Dengan demikian proses pembuatan kebenaran adalah proses diskursif yang di dalamnya tertanam hubungan kekuasaan. Arkeologi berperan untuk membaca ulang realitas dan mencari keterhubungan dengan realitas yang lain. Sedangkan genealogi digunakan sebagai alat untuk melacak asal usul dan mengungkap jalinan cerita tentang pengetahuan yang dianggap benar. Gustomy (2009) menjabarkan bahwa metode arkeologi dan genealogi merupakan sebuah konsistensi metode yang diibaratkan arkeologi menjadi bahan dasar dari bangunan, lalu genealogi adalah semen yang menyatukan dan merangkai sehingga menjadi sebuah tatanan yang kokoh.

Untuk kepentingan penelitian ini dalam menggunakan metode arkeologi dan genealogi peneliti mengumpulkan beragam pengetahuan yang menopang jalinan perdukunan dalam kontestasi politik di Desa Tirtamukti. Data ini diperoleh dari wawancara dengan beragam subjek yang terlibat dalam gugus diskursif wacana serta kesaksian pandangan mata. Selanjutnya peneliti menghubungkan semua temuan arkeologi yang telah diperoleh untuk mencari genealogi berupa sejarah awal kemunculan sebuah pengetahuan yang dianggap benar.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tirtamukti Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah. Alasan Desa Tirtamukti menjadi lokasi penelitian karena daerah tersebut masih memegang erat kebudayaan dan tradisi Jawa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses politik dan pemerintahannya. Selain itu, Desa Tirtamukti juga banyak dikenal sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya gencar melibatkan mistisisme untuk urusan-urusan tertentu baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

1.8.3 Subjek Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data untuk memeriksa keabsahan dan memperkaya data penelitian lalu selanjutnya diujikan kredibilitasnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan pada sumber data yang diperoleh (Sugiyono, 2018:270). Dalam hal ini, narasumber yang menjadi subjek pada penelitian merupakan pihak yang paham dan terlibat dalam peristiwa pemilihan kepala desa Tirtamukti, yakni sebagai berikut:

- a) Kandidat kepala desa
- b) Dukun
- c) Ahli spritual (kyai)
- d) Tim sukses yang terlibat dalam kemenangan kepala desa
- e) Masyarakat Desa Tirtamukti

Dalam teknik triangulasi sumber di atas, dikelompokkan menjadi 3 bagian untuk memastikan kualitas data dan memperkaya data, yakni dari pihak Masyarakat (warga sekitar), tokoh yang terlibat mistisisme (kyai dan dukun), serta pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala desa (kandidat kepala desa dan tim sukses).

1.8.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa teks hasil wawancara yang telah diolah dan dicoding sehingga menjadi data yang valid dan relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu jenis data lainnya yakni hasil observasi lapangan yang digunakan sebagai data penunjang untuk menganalisis keterlibatan dukun dalam membantu kandidat pada saat menjelang pemilihan kepala desa.

1.8.5 Sumber Data

- Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama. Sumber data primer merupakan hasil dari pengumpulan informasi-informasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan memahami atas topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut yakni keterlibatan dukun dalam kemenangan pemilihan kepala desa Tirtamukti.

- Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data sekunder disajikan dalam bentuk data

statistik atau data yang telah diolah dan siap untuk digunakan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan dokumentasi dari bukti pendukung serta data-data lain yang berkaitan dengan peran dukun dalam pemenangan pilkades di Desa Tirtamukti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalian informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada narasumber mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yakni wawancara mendalam semi terstruktur untuk mendapatkan data dan informasi secara detail mengenai keterlibatan dukun dalam kontestasi pemilihan kepala desa Tirtamukti.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data-data penunjang penelitian memanfaatkan peninggalan jejak yang masih bisa didapatkan untuk digunakan sebagai alat bukti atau bahan pendukung penelitian.

c. Observasi

Selain wawancara dan dokumentasi, digunakan juga obeservasi untuk melihat secara langsung dan merekam secara empiris terkait peristiwa yang terjadi dalam konteks keterlibatan dukun pada kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Tirtamukti.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Heburman dalam Sugiyono (2018) analisis data terbagi menjadi tiga dan saling berkaitan yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi menjadi lebih jelas sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, mudah untuk melihat dan memahami yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan kedepannya berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.